

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
(STUDI EMPIRIS KABUPATEN/KOTA DI PULAU SUMATERA)**

Oleh:

Gita Maiyora

Pembimbing : Yusralaini dan Riska Natariasari

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

e-mail : gitamyr@yahoo.com

*Local Government Influence on Performance Characteristics of Local Government
Finance Empirical Study on the Regional Government of Regency /Municipal Sumatra
Island.*

ABSTRACT

This study aims to demonstrate empirically the effect caused by the variable size, wealth, the size of local government legislatif, leverage and intergovernmental revenue effect with the financial performance of local government regency/municipal in Sumatra Island. This study uses purposive sampling with 83 samples obtained from regency/municipal in Sumatera Island. Data analysis techniques used in this study is multiple regression analysis with SPSS 16. The results showed that the regression equation indicates that the variable size has a positively significant effect to the financial performance where the significant value are $0,005 < 0,05$ and value of $t_{count} > t_{table} 2.862 > 1.992$. and variable intergovernmental revenue has positive value and significant impact on financial performance where the significant value are $0,000 < 0,05$ and value of $t_{count} > t_{table} 5.279 > 1.992$. While the variable wealth and the size of the legislature (DPRD) has not significant influence to the financial performance of the region with significance greater than 0.05.

Keywords : size, wealth, the size of the legislature, leverage, intergovernmental revenue, financial performance of local government

PENDAHULUAN

Dengan adanya krisis ekonomi pada awal tahun 1996 dan mencapai puncaknya pada tahun 1997 mendorong pemerintah pusat mendelegasikan sebagian wewenang untuk pengelolaan keuangan kepada

daerah yang disebut juga dengan desentralisasi. Dengan berkurangnya campur tangan pemerintah pusat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan potensi, membiayai

pembangunan dan kemandirian daerah. Menurut I Gusti Agung Rai (2008:17), cara untuk mencapai kemajuan sebuah organisasi adalah dengan melakukan pengukuran kinerja, untuk memperbaiki kinerja perlu dilakukan evaluasi, agar dapat diukur kinerja harus dikuantifikasi. Pengertian kinerja menurut Indra Bastian (2006:274) adalah gambaran pencapaian pelaksanaan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi. Dalam penilaian kinerja kebanyakan menggunakan aspek keuangan, dan pada umumnya banyak yang beranggapan bahwa keadaan keuangan akan mencerminkan keadaan seutuhnya (Wanahdie, 2009). Banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi kinerja, khususnya kinerja keuangan pemerintah daerah juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik pemerintah daerah antara lain dapat berupa ukuran daerah, kesejahteraan, *functional differentiation*, umur daerah, latar belakang pendidikan kepala daerah. Penelitian tentang kinerja keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan dengan hasil yang berbeda. Peneliti termasuk untuk meneliti ulang tentang kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Sumatera, karena beberapa penelitian terdahulu hanya meneliti pada tingkat daerah tertentu saja. Peneliti akan menguji tentang kinerja keuangan pemerintah daerah yang dapat diperkirakan dapat dipengaruhi oleh karakteristik pemerintah daerah

antara lain seperti ukuran (*size*) pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset, tingkat kemakmuran daerah (*wealth*) yang diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Ukuran legislatif yang diproksikan dengan jumlah anggota DPRD, *leverage* yang diproksikan dengan jumlah hutang pemerintah daerah dan *intergovernmental revenue* yang diproksikan dengan Dana Alokasi Umum (DAU)..

Size yang besar dapat membantu kegiatan operasional pemerintah daerah yang diiringi dengan meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah daerah yang memiliki ukuran aset besar memiliki tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan atas laporan keuangannya. Dengan demikian, pemerintah daerah yang memiliki ukuran aset yang besar akan dituntut untuk memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan pemerintah daerah yang kecil ukurannya.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan yaitu kemakmuran. Kemakmuran (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Abdullah, 2004). Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD, karena dengan pertumbuhan yang positif dimanfaatkan pemerintah guna mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan

investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah (Sumarjo,2010).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah (Winarna dan Murni, 2007). Pasal 69 ayat 1 menyatakan bahwa anggota DPRD Kabupaten/Kota berjumlah sekurang-kurangnya dua puluh orang dan sebanyak-banyaknya empat puluh lima orang. Besarnya jumlah anggota DPRD diharapkan juga dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, sehingga berdampak baik dengan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Leverage adalah perbandingan antara utang dan modal. Sebagaimana semakin besar *leverage* maka semakin besar ketergantungan entitas pada pihak luar karena semakin besar utang yang dimiliki entitas tersebut maka semakin rendah kinerja keuangan entitas tersebut (Kusumawardani, 2012). Sudarmadji dan Sularto (2007) mengungkapkan bahwa *leverage* adalah ukuran yang digunakan dalam mengetahui besarnya aktiva yang dibiayai dengan hutang.

Faktor terakhir yang dapat berpengaruh terhadap ukuran kinerja dalam penelitian ini yaitu *Intergovernmental revenue*, yakni sejumlah transfer dana dari pusat yang sengaja dibuat untuk membiayai program-program

pemerintah daerah (Nam, 2001). Pemerintah pusat berharap dengan adanya transfer tersebut maka pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah ukuran (*size*) pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota ?
2. Apakah kemakmuran (*wealth*) pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota ?
3. Apakah ukuran legislatif pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota ?
4. Apakah *leverage* pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota ?
5. Apakah *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota ?

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang :

- 1) Pengaruh ukuran (*size*) pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 2) Pengaruh kemakmuran (*wealth*) pemerintah daerah

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

- 3) Pengaruh ukuran legislatif pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 4) Pengaruh *leverage* pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 5) Pengaruh *intergovernmental revenue* pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Pengaruh *Size* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Ukuran yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Kemudahan di bidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja (Kusumawardani, 2012). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sumarjo (2010) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran (*size*) pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Mirna (2012)

menunjukkan bahwa pengujian secara simultan menunjukkan bahwa *Size* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H₁: Ukuran (*size*) pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh *wealth* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Kekayaan (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Abdullah, 2004 dalam Sumarjo, 2010). Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Disamping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka kinerja pemerintah dianggap semakin baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Wenny (2012) mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H₂ : Kemakmuran (*wealth*) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

DPRD memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Lembaga legislatif harus memperhatikan mengenai seberapa besar pengeluaran pemerintah daerah yang akan dilakukan dan berapa pemasukan yang akan diterima. Banyaknya jumlah anggota DPRD diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin besar jumlah anggota legislatif diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui adanya pengawasan. Hasil penelitian Mirna (2012), menunjukkan variabel ukuran legislatif memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H₃ : Ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

4. Pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Leverage adalah Perbandingan antara utang dan modal (Kusumawardani, 2012). Sebagaimana semakin besar *leverage* maka semakin besar ketergantungan

entitas pada pihak luar karena semakin besar utang yang dimiliki entitas tersebut maka semakin rendah kinerja keuangan entitas tersebut.

Sumarjo (2010) menyatakan bahwa semakin besar *leverage* semakin menunjukkan entitas tidak mampu dalam membiayai operasionalnya sendiri karena membutuhkan dana dari pihak eksternal. Sedangkan semakin kecil *leverage* semakin besar kemampuan entitas dalam membiayai biaya operasional melalui dana internalnya. *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Mirna (2012) yang mengungkapkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H₄ : *Leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4. Pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

UU No.33 tahun 2004 menyebutkan bahwa dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada negara berkembang menunjukkan bahwa masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat atau disebut

intergovernmental Revenue (Kelly, 2010). *Intergovernmental revenue* dalam penelitian ini dilihat dari jumlah dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Pemerintah pusat berharap dengan adanya transfer tersebut, maka pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerjanya. Penelitian yang dilakukan oleh Gideon (2013) menyatakan bahwa *Intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja kinerja satuan kerja perangkat daerah. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H₅ : *Intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Populasi adalah keseluruhan orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Pulau Sumatera. Sampel merupakan sebagian dari populasi atau sejumlah anggota yang dipilih dari populasi (Sekaran, 2006). Sampel penelitian diperoleh dari laporan keuangan daerah dan realisasi APBD pemerintah kota/kabupaten yang ada di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera terdiri dari 151 Kabupaten/Kota. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan *purposiv sampling*, yaitu metode pengambilan sampel dimana peneliti memiliki tujuan atau target tertentu dalam memilih sampel yang diacak, (Indrianto. 2002;131).

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan data sekunder yang berupa data keuangan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota serta data non keuangan, berupa ukuran legislatif didapat dari data anggota DPRD per Kabupaten/Kota melalui website resmi. Data LKPD yang dikumpulkan diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang tersedia di website www.dipk.depkeu.go.id dan situs resmi BPK-RI, yaitu www.bpk.go.id.

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah gambaran pencapaian pelaksanaan kegiatan, program kerja dan kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Menurut Halim (2007:231) terdapat enam rasio yang dapat dijadikan tolak ukur dalam kinerja keuangan pemerintah yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, *debt service coverage rasio*, rasio pertumbuhan. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan rasio efisiensi yaitu membandingkan antara total realisasi belanja pemerintah daerah dengan jumlah pendapatan pemerintah daerah.

Size dapat di ukur dengan jumlah karyawan, total aset, total pendapatan, dan tingkat produktifitas (Damanpour, 1991). Berdasarkan

penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010), peneliti menggunakan total aktiva dalam mengukur ukuran (*size*). Pertimbangan pengukuran ini karena nilai aktiva lebih stabil daripada nilai penjualan bersih dan kapitalisasi pasar (Wuryaningsih, 2002).

Kemakmuran (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertimbangan pengukuran kemakmuran dengan PAD ini karena meskipun kecilnya kontribusi PAD terhadap pemerintah daerah di Indonesia (sekitar 1% - 16%). Penelitian ini menggunakan PAD untuk mengukur kemakmuran seperti ukuran yang digunakan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erry (2013) menggunakan PAD dalam mengukur kemakmuran dengan menggunakan pendapatan asli daerah.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab kepada pemerintah pusat atas kinerja keuangannya. Pada era otonomi ini, peranan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan sesuatu yang sangat penting (Winarna dan Murni, 2007). Penelitian yang dilakukan Gilligan dan Matsusaka (2001) menggunakan jumlah total anggota DPRD dalam mengukur ukuran legislatif. Sehingga peneliti menggunakan jumlah anggota DPRD sebagai ukuran legislatif.

Penelitian yang dilakukan Weill (2003) mengungkapkan bahwa *leverage* merupakan proporsi yang menggambarkan besarnya utang

kepada pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa jika jumlah utang lebih besar daripada modal sendiri maka hal tersebut menggambarkan bahwa sumber utama pendanaan entitas tersebut berasal dari pihak eksternal (Perwitasari, 2009). Penelitian yang dilakukan Haniffa dan Cooke (2005), Miranti (2009), dan Choiriyah (2010) menggunakan rasio utang terhadap modal sendiri dalam menghitung *leverage*.

Intergovernmental Revenue adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali (Patrick, 2007). Proksi dari *intergovernmental revenue* dalam penelitian ini menggunakan perbandingan antara total dana perimbangan dengan total pendapatan. *Intergovernmental revenue* diukur dengan proksi yang sama dalam penelitian Patrick (2007). Pengukuran ini dipilih karena *intergovernmental revenue* merupakan bagian dari pendapatan daerah yang berasal dari lingkungan eksternal (luar kotamadya) dan besarnya ketergantungan pemerintah daerah dari transfer pemerintah pusat (80% - 98%) (Suhardjanto et al., 2010). Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan model regresi linier berganda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah se-Sumatera tahun 2010. Dalam penelitian ini digunakan jumlah sampel yaitu sebesar 83 pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyediakan data dan informasi secara lengkap terkait kinerja keuangan pemerintah daerah dalam LKPD-nya.

2. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel berikut adalah statistic deskriptif dari 83 pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera pada tahun 2010 yang diteliti.

Data Descriptive statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviasi
Size	83	9.11E10	8.12E12	1.6930E12	1.37339E12
Wealth	83	4.59865E3	5.88941E5	4.1886005E4	7.68212687E4
Ukrn Legislatif	83	19	50	33.33	9.226
Leverage	83	5.53480000 0E-4	.015437317	.00120573131	.002961463477
Intergvr.Rev	83	.000000000	.771694481	.56569256811	.183316007870
Kinerja keu	83	.349560909	1.12538204 7E0	.96684703792	.094374825304

Sumber : Data Olahan Tahun 2014

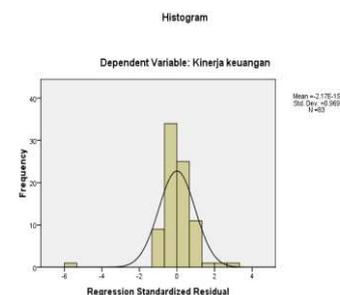
3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk mendapatkan analisis yang akurat atas faktor-

faktor yang perlu dipertimbangkan dalam analisis.

3.1 Hasil Uji Normalitas Data

Dengan menggunakan normal P-P Plot dapat dilihat apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas Hasil uji normalitas dilakukan dengan normal P-P plot sebagai berikut :



3.2 Hasil uji Multikolinieritas

Untuk mengetahui apakah terjadi multikorelerenitas dalam suatu model regresi dapat dilihat dari nilai VIF (Value inflation factor) yang terdapat pada masing-masing variabel. Pedoman untuk

suatu model regresi yang bebas dari multikolinieritas apabila memiliki nilai VIF dibawah 10, seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Constant		
Size	0.363	2.754
Wealth	0,599	1.671
Ukuran Legislatif	0,910	1.099
Leverage	0,941	1.063
Interg. Revenue	0,543	1.841

3.3 Hasil uji autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada kesalahan pengganggu pada $t-1$ (sebelumnya).

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.527 ^a	.277	.231	0.0827	2.100

4.1 Predictors: (Constant), *Intergovernmental Rev*, *Leverage*, *Ukuran legislatif*, *Wealth*, *Size*

4.2 Dependent Variable : Kinerja keuangan
Sumber : Data Olahan SPSS tahun 2014

Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini adalah adalah $DW = 2.100$, nilai tersebut kemudian dikonsultasikan dengan du pada tabel Durbin-Watson. Nilai du untuk $k = 5$ dan dengan jumlah pengamatan sebanyak 83 diperoleh sebesar 2.100. Dari nilai tersebut diperoleh DW sebesar 2.100 berada diantara $du (1.7728)$ dan $5-du (2.58)$ menunjukkan bahwa model regresi tersebut tidak memiliki masalah autokorelasi.

3.4 Hasil uji heterokedastisitas

Heterokedastisitas merupakan keadaan yang menggambarkan seluruh faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama untuk seluruh pengamatan atas variabel independen. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa probabilitas (sig) dalam tiap model regresi yang digunakan dalam penelitian ini lebih besar dari 0,05 atau 5% sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam semua model regresi penelitian ini.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.724	.060		12.075	.000
Size	3.161E-14	.000	.460	2.862	.005
Wealth	1.256E-7	.000	.102	.817	.417
Ukuran legislatif	.000	.001	-.062	-.612	.542
Leverage	2.309	3.182	.072	.725	.470
Intergovernmental Rev	.357	.068	.694	5.279	.000

a. Dependent Variable: Kinerja keuangan

4. Hasil Analisis Data

4.1 Model Regresi Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah :

$$Y = 0.724 + 3.160X_1 + 1.256X_2 - 6.358X_3 + 2.308X_4 + 0.357X_5$$

4.2 Hasil pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Tingkat koefisien Determinasi yang dimiliki sebesar Adj. $R^2 = 0.231$. hal ini berarti kemampuan *Size*, *Wealth*, Ukuran legislatif, *Leverage*, dan *intergovernmental revenue*

untuk menjelaskan kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu sebesar 23%. Sedangkan Variabel dependen yaitu kinerja keuangan dapat dijelaskan 77% dari variabel yang lain. Tingkat R^2 yang diperoleh rendah, hal ini disebabkan karena 5 variabel yang diteliti hanya 2 variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya nilai R diperoleh sebesar 0.527 artinya hubungan antara kinerja keuangan dengan *Size*, *Wealth*, Ukuran legislatif, *Leverage*, dan *intergovernmental revenue* yang berkategori pengaruh dan hubungannya rendah dan positif.

4.3 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji signifikansi-F dilakukan guna menentukan *good of fit test* atau uji kelayakan model regresi untuk digunakan dalam melakukan analisis hipotesis dalam penelitian.

Dari tabel di atas diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 5,914 dengan nilai probabilitas (sig)=0,000. Nilai $F_{hitung} (5,914) > F_{tabel} (2,33)$, dan nilai sig . lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai $0,000 < 0,05$, maka H_{01} diterima, berarti secara bersama-sama (simultan) *Size*, *Wealth*, Ukuran legislatif, *Leverage*, dan *intergovernmental revenue* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.203	5	.041	5.914	.000 ^a
Residual	.528	77	.007		
Total	.730	82			

a. Predictors: (Constant), Intergoverment.rev, Leverage, Ukuran legislatif, Wealth,Size

b. Dependent Variable : Kinerja keuangan

4.4 Uji Koefisien Regresi (Uji Statistik T)

a. Hipotesis 1

Dari tabel diatas dapat dilihat thitung sebesar 2.862. Dengan demikian nilai kurs memiliki thitung $2.862 > t_{tabel} 1,992$ yang berarti H_a diterima dan H_0 ditolak. Demikian juga halnya dengan nilai signifikan memiliki Pvalue $0,005 < \alpha$ yakni 0,05, maka disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara

ukuran pemerintah (size) terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera.

Ukuran daerah adalah prediktor signifikan untuk kepatuhan akuntansi (Patrick, 2007). Pemerintah daerah perlu mengungkapkan lebih lanjut tentang daftar aset yang dimiliki, pemeliharaan, dan pengelolaannya (Suhardjanto et al., 2010). Pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan atas laporan kerjanya akan lebih terdorong untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat *good news*. *Good news* tersebut dapat berupa laporan mengenai baiknya kinerja pemerintah daerah tersebut sehingga meningkatkan skor kerjanya.

Hasil Penelitian ini sesuai dengan Penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini, dan Fitriasari (2012) yang meneliti mengenai Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan Temuan audit bpk terhadap Kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota Di Indonesia.

b. Hipotesis 2

Dari tabel 4.11 diatas dapat diketahui thitung sebesar 0.817. Dengan demikian, Wealth memiliki thitung $0.817 < t_{tabel} 1,992$ yang berarti H_a ditolak dan H_0 diterima. Demikian juga halnya dengan signifikan yang memiliki P value $0.417 > \alpha$ yakni 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara Wealth (kemakmuran) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sumatera.

Hasil Penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nandhya Marfiana dan Lulus Kurniasih (2011) mengenai Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit bpk terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di pulau Jawa, bahwa tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa. Berdasarkan pengujian uji regresi berganda dapat terlihat bahwa tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa peran PAD dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah belum dapat berfungsi dengan semestinya (Sumardjo, 2010). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Cherrya Dhia Wenny (2012) tentang Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan menjelaskan bahwa PAD yang merupakan alat ukur dari Wealth berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun hal ini dapat diterima karena mengingat besarnya porsi ketergantungan pemerintah daerah di Indonesia terhadap transfer dana dari pemerintah pusat (Hadi, et.al., 2009).

c. Hipotesis 3

Dari tabel diatas dapat diketahui thitung sebesar -0.612. Dengan demikian, Ukuran legislatif memiliki thitung $-0.612 < t_{tabel} 1,992$

yang berarti H_a ditolak dan H_0 diterima. Demikian juga halnya dengan signifikan yang memiliki $P_{value} 542 > \alpha$ yakni 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sumatera.

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) yang meneliti tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang menemukan bahwa Ukuran legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Mirna Sesotyaningtyas (2012) tentang Pengaruh *leverage*, ukuran legislatif, *intergovernmental revenue* dan Pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang menyatakan bahwa berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ukuran legislatif yang diproksikan dengan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak sesuai dengan hipotesis awal dalam penelitian ini. Berdasarkan pengujian uji regresi berganda didapatkan hasil bahwaterdapat pengaruh yang negatif signifikan antara jumlah anggota DPRD dengan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa banyaknya jumlah anggota DPRD belum tentu

dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Bahkan malah semakin menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Peran yang diharapkan pada anggota DPRD dalam kaitannya dengan kinerja yaitu dalam hal pengawasan pelaksanaan kinerja oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Seharusnya DPRD diharapkan dapat lebih sensitif dan aktif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat mengingat mereka pun terpilih menjadi anggota DPRD karena pilihan masyarakat (Kurniasih, 2013). Kurangnya peran anggota DPRD dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dapat kita lihat dengan maraknya berita buruk seperti banyaknya anggota DPRD kabupaten maupun kota yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi (Sumarjo, 2010)

d. Hipotesis 4

Dari tabel 4.13 diatas dapat diketahui thitung sebesar 0.725. Dengan demikian, Ukuran legislatif memiliki thitung $0.725 < t$ tabel 1,992 yang berarti H_a ditolak dan H_0 diterima. Demikian juga halnya dengan signifikan yang memiliki $P_{value} .470 > \alpha$ yakni 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara *Leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sumatera.

Hal ini dpt dijelaskan ketika *leverage* menunjukkan pendanaan utang terhadap modal. Sedangkan menurut Bastian (2005) pendanaan

dalam sektor publik adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendanaan tersebut akan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah. Dari keempat pendapatan tersebut pinjaman daerah adalah pilihan terakhir setelah Pendapatan yang dimiliki pemerintah daerah dan Dana Perimbangan karena kedua hal tersebut tidak memiliki resiko yang tinggi bagi pemerintah daerah karena tidak ada beban bunga yang harus dibayar (Kusumawardani (2012).

e. Hipotesis 5

Dari tabel 4.14 diatas dapat diketahui thitung sebesar 5.279. Dengan demikian, Intergovernmental Revenue memiliki thitung $5.279 > t_{tabel} 1,992$ yang berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak. Demikian juga halnya dengan signifikan yang memiliki Pvalue $.000 < \alpha$ yakni 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Intergovernmental Revenue terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sumatera.

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang diprosikan dengan porsi DAU dalam total realisasi pendapatan daerah sesuai dengan hipotesis yaitu berpengaruh positif signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi DAU terhadap pemerintah pusat maka semakin tinggi pula tingkat kinerja keuangan pemerintah

daerah (Kurniasih, 2013). Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) yang menjelaskan bahwa intergovernmental revenue berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ditambah dengan penelitian yang dilakukan oleh Nandhya Marfiana dan Lulus Kurniasih (2011) mengenai di pulau Jawa yang juga menyimpulkan bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan jumlah belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Erry fratama (2013) mengenai Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah (study Empiris pada pemerintah kabupaten/kota Se-sumatera utara) dan Gideon Simanullang (2013) tentang Pengaruh belanja modal, intergovernmental Revenue dan pendapatan asli daerah terhadap Kinerja keuangan daerah kota dan kabupaten Di provinsi kepulauan riau tahun 2008 – 2012 juga menyimpulkan hipotesis yang sama dengan hasil penelitian bahwa intergovernmental revenue berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Pengujian data karakteristik pemerintah daerah yang terdiri dari ukuran (*size*) pemerintah daerah, kemakmuran (*wealth*), ukuran

legislatif, *leverage*, dan *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keangan pemerintah daerah yang dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. *Size* (ukuran) pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti *size* merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kinerja keuangan.
2. *Wealth* (kemakmuran) pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti *Wealth* merupakan salah satu factor yang bukan merupakan factor yang berpengaruh untuk meningkatkan kinerja keuangan.
3. Ukuran legislatif pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti ukuran legislatif merupakan salah satu faktor yang bukan merupakan faktor yang berpengaruh untuk meningkatkan kinerja keuangan.
4. *Leverage* pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti *Leverage* merupakan salah satu factor yang bukan merupakan faktor yang berpengaruh untuk meningkatkan kinerja keuangan.
5. *Intergovernmental Revenue* pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti *Intergovernmental Revenue*

merupakan salah satu factor yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kinerja keuangan.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah, hasil simpulan diatas menjadi dasar bagi peneliti untuk mengajukan saran bagi pemerintah daerah di Indonesia khususnya dan pemerintah pusat pada umumnya untuk dapat lebih meningkatkan kinerja keuangannya.
2. Pemerintah wajib mempublikasikan transparansi realisasi anggaran seperti laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang tepat dan akurat bagaimana alokasi dari APBD setiap daerah sebenarnya dan penelitian Empiris untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah dapat dilakukan seterusnya.
3. Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar memperluas periode pengamatan agar lebih akurat dalam membandingkan hasil penelitian dari tahun ke tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Ray, I Gusti. 2008. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat
- Bastian, I. 2005. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

- Fahmi, Irham. 2011. *Analisis laporan Keuangan..* Cetakan pertama. Alfabeta. Bandung.
- Fratama, Erry. 2013. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Study Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara). *Skripsi Universitas Negeri Medan*
- Kusumawardani, Media. 2012. Pengaruh *Size*, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Skripsi* Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
- Mustikarini, Widya Astuti dan Fitriyasi, Debby. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. Forum: *Simposium Nasional Akuntansi 15*, <http://www.sna.akuntansi.unikal.ac.id>
- Perwitasari, Citra. 2010. The Influence of Financial Performance to the Level of Accountability Disclosure of Indonesia's Local Government. *Tesis* Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sesotyaningtyas, Mirna. 2012. Pengaruh *Leverage*, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Accounting analysis* Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Wahyuningsih, Hielmawaty, 2010, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Periode 2006-2009 Studi Empiris Di Provinsi Riau. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- IAI, (2007). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. 2003. Jakarta: Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia
- www.bpk.go.id
www.dipk.depkeu.go.id